

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGGKIDUL MASA  
REVOLUSI HIJAU (1970-1974)**

**JURNAL SKRIPSI**



**Oleh:  
II RUBI KANDAR  
10406244012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

# KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL MASA REVOLUSI HIJAU (1970-1974)

---

Penulis: II RUBI KANDAR  
Pembimbing: ZULKARNAIN, M. Pd  
Email: ruby\_kandar@yahoo.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul sebelum pelaksanaan Revolusi Hijau. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Ketiga untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan. pertama, penentuan topik, kedua pengumpulan sumber (*heuristik*) baik sumber primer maupun sekunder. Ketiga, kritik sumber (*verifikasi*), yaitu kritik ekstern maupun intern terhadap sumber yang diperoleh. keempat penafsiran (*interpretasi*) fakta sejarah yang ditemukan. kelima penulisan (*historiografi*) penjelasan sejarah secara kronologis. Hasil penelitian ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari penggunaan tanah oleh petani yaitu tanah pekarangan, tanah tegalan dan tanah lereng bukit. Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi dipihak lain telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yang timbulnya gejala stratifikasi sosial. Kesejahteraan petani miskin dan buruh tani tak bertanah tetap mandek atau bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Kondisi sosial ekonomi petani diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah Jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

**Kata Kunci:** kondisi sosial ekonomi, gunungkidul, revolusi hijau, 1970-1974

---

## *SOCIO ECONOMIC CONDITIONS OF GUNUNGKIDUL SOCIETY PERIOD GREEN REVOLUTION (1970-1974)*

---

### ABSTRACT

*This study aims to investigate: first, socio-economic conditions of the Gunungkidul society before the implementation of the Green Revolution, second, the implementation of the Green Revolution for the Gunungkidul society, and third, socio-economic impacts of the implementation of the Green Revolution on the Gunungkidul society. The study employed the historical method consisting of five stages. The first was topic selection. The second was source collection (heuristics) including both primary and secondary sources. The third was source criticism (verification), namely external and internal criticisms of the collected sources. The fourth was interpretation of obtained historical facts. The fifth was the writing (historiography) of chronological historical explanation. The results of the study were as follows. The socio-economic conditions of the Gunungkidul society could be viewed from the use of land by farmers, namely premises land, dry field land, and mountain slope land. On the one hand, the Green Revolution succeeded in improving the rice production, but on the other hand, it resulted in the uneven distribution of profits and socio-economic impacts on the rural communities in the form of social stratification phenomena. The welfare of poor farmers and landless agricultural employees did not improve or could not be increased; it remained at the low level. The farmers' socio-economic conditions were worsened by several factors. First, land was divided into smaller parts resulting from the inheritance right of land in Java which tended to increase the centralization of land possession by landowners. Second, the factor parallel to the process above was the increase of unemployment in rural areas, resulting in severe economic pressure and poverty in villages. Third, the modernization process through technology modernization processes made farmers trapped in a circle of debts. Fourth, all types of development efforts resulted in polarization in villages; the rich became richer and richer and the poor became poorer and poorer.*

**Keywords:** socio-economic conditions, Gunungkidul, Green Revolution, 1970-1974

## I. PENDAHULUAN

Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bagian antara kelima Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak dahulu daerah ini sudah dikenal sebagai daerah miskin. Kemiskinan yang terjadi di daerah ini dikarenakan oleh bentang alam yang berbukit-bukit, penuh dengan batu kapur, serta miskin sumber mata air. Keadaan ini sering disebut dengan kemiskinan alamiah. Sebagaimana besar petani Gunungkidul mengusahakan tanah tegalan yang hanya mengandalkan air hujan. Sedikit sekali areal tanah pertanian yang bisa diusahakan dengan pengairan tetap. Daerah yang masih dapat diusahakan dengan pengairan adalah Pojong, Ngawen, Nglipar, Karang Mojo dan Patuk. Kelima daerah tersebut terletak di Zona Utara dan Zone ledok Wonosari (Zona Tengah) yang relatif daerah tersebut tidak mengalami kesulitan air bersih termasuk pada musim kemarau. Hal ini berbeda dengan daerah yang berada di Zona Selatan atau bisa dikenal dengan Zona Pegunungan Seribu atau Zuider Gebergton. Wilayah zona ini mempunyai ketinggian 100-300 meter di atas permukaan laut. Daerah di Zona Selatan ini keberadaan air sangat sulit. Akan tetapi masyarakat Gunung Kidul yang tinggal di Zona Selatan sebagian besar (mayoritas) bekerja sebagai petani. Mereka tetap mengolah tanah yang berbukit-bukit itu dengan keterbatasan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pelaksanaan Revolusi Hijau di Gunungkidul terdapat perbedaan di dibandingkan daerah lain, di daerah ini pembangunan pertanian dihadapkan pada persoalan mengatasi tanah kritis. Pada awal pembangunan muncul persoalan yang rumit menghadang, antara mendahulukan pembangunan pertanian tanaman pangan yang mengutamakan peningkatan produksi tanaman pangan, berarti mengundang erosi atau mendahulukan pencegahan erosi berarti mengundang kelaparan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah Gunungkidul sejak tahun 1969 telah berupaya menggerakkan semua potensi sosial guna menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Untuk itu digunakan pupuk buatan serta obat-obatan pemberantas hama serta mulai juga menggunakan teknologi pertanian baru. Sebagai upaya penanggulangan erosi di tanam pohon Akasia.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Penulisan sejarah perlu mengetahui juga konsep-konsep tentang permasalahan yang akan dikaji. Salah satunya melalui sumber-sumber pustaka atau yang sering disebut kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran.<sup>1</sup> Pustaka-pustaka digunakan untuk menelaah setiap pertanyaan dalam rumusan masalah dalam garis besar. Rumusan masalah pertama mengkaji tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul sebelum pelaksanaan Revolusi Hijau. Karya Fajar Pratikto yang Merupakan hasil penelitiannya untuk Skripsi S1 yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani. Tulisan Fajar lebih menekankan pada bidang politik yang terjadi pada dekade 1960-an di Gunungkidul tanpa mengesampingkan keadaan sosial ekonomi yang ada. Karya ini sangat membantu dalam memahami kondisi Gunungkidul pada dekade tersebut dan keadaan masyarakat pada umumnya di Gunungkidul pada saat menghadapi masa sulit.

Rumusan masalah kedua mengkaji tentang pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Tulisan Mubyarto menjelaskan bagaimana perkembangan pertanian di Indonesia dari masa ke masa yang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintahan, munculnya kesenjangan antara kawasan dataran rendah dengan kawasan dataran tinggi atau kawasan non padi dan pemerintah juga menyediakan prasarana kredit serta prasarana penunjang lain seperti rehabilitasi pembangunan prasarana irigasi. Dalam karya ini memberikan penjelasan secara umum pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan pelaksanaan Revolusi Hijau khususnya pada Daerah Kabupaten Gunungkidul apakah ada perbedaan pada daerah lainnya.

---

<sup>1</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penelisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2006, hlm. 3.

Rumusan masalah ketiga mengkaji tentang dampak sosial ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Tulisan Selo Soemardjan dalam bentuk sebuah buku berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Dalam tulisannya Selo Soemardjan menjelaskan bagaimana Perubahan Sosial di Yogyakarta dari jaman Penjajahan Kolonial Belanda sampai Kemerdekaan, Inovasi di Bidang Pertanian Rakyat, Petani dan lingkungannya, pembangunan pertanian juga menimbulkan akibat-akibat negatif, antara lain berupa timbulnya gejala pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian serta tergesernya petani penyangkap menjadi petani buruh upahan. Karya ini memberikan penjelasan bagaimana Perubahan Sosial di Yogyakarta. Namun, dalam karyanya ini banyak mengungkapkan daerah Yogyakarta secara umum dan sedikit menyinggung daerah Gunungkidul. Tapi karya ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk melihat gambaran dan hubungan masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta. Sedangkan tulisan ini mencoba melihat pengaruh Revolusi Hijau dan pembangunan pertanian di daerah Gunungkidul.

### III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode sejarah kritis untuk merekonstruksi sebuah peristiwa atau rekaman sejarah. Seperti yang dituliskan dalam buku “*Mengerti Sejarah*” oleh Louis Gottscalk yang sudah diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, bahwa metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.<sup>2</sup> Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan lima tahap metode sejarah kritis seperti yang disampaikan oleh Kuntowijoyo yaitu, pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.<sup>3</sup>

### IV. PEMBAHASAN

#### A. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEBELUM PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU

Secara geografis, Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungkidul terkenal dengan sebutan daerah kritis karena tanahnya yang tandus dan sebagian besar terdiri dari tanah kapur. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul terletak di bagian Tenggara dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 47%<sup>4</sup> dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan dengan ibukotanya Wonosari. Keadaan alam dikelilingi oleh dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan daerah yang dikenal selalu kekurangan air serta rawan kekurangan pangan. Kabupaten Gunungkidul terletak pada 110° 36' BT 7° 58' LS, secara topografis terbagi dalam 3 Zona.<sup>5</sup>

Secara administratif daerah Kabupaten Gunungkidul pada awal Tahun 1960-an terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 144 kelurahan dengan luas geografinya keseluruhan ± 1.485,13 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Gunungkidul mempunyai batas administratif sebagai berikut: sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten daerah Tingkat II Klaten dan Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Jawa Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.<sup>6</sup> Pusat

---

<sup>2</sup> Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*. (Penerjemah Nugroho Notosusanto), cet. IV. Jakarta: UI-Press, 1985, hlm.39.

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*,(cet. IV). Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm. 89.

<sup>4</sup> Biro Statistik DIY, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*. Yogyakarta, 1973, hlm. 19.

<sup>5</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan*. Yogyakarta ; Media Presindo, 2000, hlm. 29.

<sup>6</sup> Biro Statistik Kabupaten Gunung Kidul, *Kabupaten Gunung Kidul Tingkat II: Gunung Kidul Dalam Angka Tahun 1980*. Yogyakarta: Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik, hlm. 4.

pemerintahan Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Wonosari karena menjadi ibu kota Kabupaten. Daerah ini juga menjadi pusat kegiatan masyarakat dan menjadi kecamatan teramai jumlah penduduknya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari tata guna tanah atau penggunaan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja apabila dilihat dari letak tanahnya. Terdapat tiga macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani yaitu tanah perkarangan, tanah tegalan,<sup>7</sup> dan tanah lereng bukit atau lereng gunung.

## **B. PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL**

Repelita I yang mulai diluncurkan pada tahun 1969, memilih pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian pangan atau beras sebagai titik sentral. Pengenalan teknologi baru yang memungkinkan untuk meningkatkan produksi beras dengan cepat sekali. Teknologi baru ini muncul dengan wujud benih-benih unggul yang sangat responsif terhadap pemakaian pupuk dalam arti bahwa pemakaian pupuk terhadap benih-benih unggul tersebut menghasilkan kenaikan produksi yang tinggi sekali. Selain itu, politik beras yang ditekankan pada kebijakan peningkatan produksi ini dikelola dalam program nasional yang menjadi terkenal sampai sekarang yaitu Bimas (Bimbingan Massa), dimana presiden secara langsung memonitor perkembangan sampai ke desa-desa. Bimas dilaksanakan melalui program Panca Usaha yaitu lima cara untuk menaikkan produksi (bibit unggul, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, dan sistem bercocok tanam yang lebih baik.<sup>8</sup>

Gelombang Revolusi Hijau yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an ternyata tidak pilih kasih. Artinya, ia tidak saja melanda daerah-daerah yang relatif subur seperti daerah persawahan tetapi juga melanda daerah-daerah lahan kering yang secara potensial miskin. Keadaan ini sesuai dengan intruksi Menteri Pertanian kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Seluruh Indonesia.<sup>9</sup> Begitu juga di Daerah Gunungkidul yang sebagian besar tanahnya berupa lahan kering mendapat terpaan gelombang Revolusi Hijau melalui program-program pembangunan yang masuk ke daerah itu. Terdorong oleh masalah dilematis yakni apabila pembangunan pertanian dilaksanakan dengan titik penekanan pada peningkatan produksi pertanian, kerusakan tanah yang semakin parah akibat erosi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga, sebaliknya apabila pembangunan pertanian ditekankan pada penanggulangan erosi berarti akan mengundang kelaparan, maka pembangunan pedesaan di daerah ini dilakukan secara seimbang dan serasi.

Sejak tahun 1970-an Pemerintah Gunungkidul telah mengupayakan semua potensi sosial dan teknologi pertanian agar masalah pembangunan di sektor pertanian dapat tercapai dan kekurangan pangan dapat ditekan. Lembaga-lembaga baru di pedesaan dibentuk seperti lembaga Wilayah Unit Desa (Wilud), Organisasi Petani Pemakai Air (OPPA), kontak tani, kelompok tani, dan sebagainya. Dengan terbentuknya lembaga-lembaga itu dan turut andil tokoh-tokoh masyarakat untuk menggerakkan warga sangat besar.<sup>10</sup> Demikian pula, dengan pemakaian teknologi pertanian, memang produksi tanaman pangan dapat mengalami kenaikan. Tetapi, usaha untuk memaksimalkan produksi tanaman pangan tidak cukup karena teknologi Revolusi Hijau yang diterapkan sangat membutuhkan air mengalami kesulitan. Sedangkan, di Kabupaten Gunungkidul air menjadi masalah utama yang sulit diperoleh terutama pada musim kemarau.

---

<sup>7</sup> Tanah yang ditanami palawija dan sebagainya dengan tidak menggunakan sistem irigasi, tetapi bergantung pada air hujan.

<sup>8</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 73.

<sup>9</sup> Surat Menteri Pertanian Kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, *Prihal: Pemberitaan Usaha-usaha Pembangunan*. Djakarta, 26 Mei 1971.

<sup>10</sup> Nur Aini Setiawan, *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop : Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas sastra UGM, 1996, hlm. 34.

Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi di pihak lain telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yang timbulnya gejala stratifikasi sosial. Kesejahteraan petani miskin dan buruh tani tak bertanah tetap mandek atau bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Revolusi Hijau lebih menguntungkan petani kaya daripada petani miskin. Karena, petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimilikinya dibandingkan petani kecil, petani kaya dapat menanggung resiko gagal panen yang diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak dikuasai petani kecil dan petani kaya dapat memperbesar produksinya dengan cara menyewa walaupun tidak menimbulkan akumulasi pemilikan tanah tetapi menimbulkan akumulasi penguasaan tanah. Rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan hasil tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Pengembangan tanaman padi sulit dilakukan di Kabupaten Gunungkidul karena, Pertama, sulitnya sumber air untuk keperluan pertanian, khususnya pada musim kemarau, air yang diharapkan adalah air hujan, sehingga musim tanam tergantung pada curah hujan. Kedua, kondisi tanah yang dapat ditanami padi hanya 6.080 Ha berupa sawah dan tegal 84.907 Ha.<sup>11</sup> Ketiga, tidak cocoknya sebagian besar tanah untuk ditanami padi karena jenis tanah yang berbukit-bukit dan berupa tanah kapur.

### C. DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL

Lembaga pemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul dibedakan menjadi dua bentuk kepemilikan, yakni pemilikan perorangan atau individu dan pemilikan komunal atau tanah desa. Pemilikan tanah perorangan tercermin dalam bentuk tanah *yasas*.<sup>12</sup> Proses kepemilikan tanah ini kemungkinan karena pembelian, pewarisan dan pembukaan lahan baru. Dari arti kata *yasas* atau *yoso* yang dapat diterjemahkan membuat atau mencari sebenarnya pemilikan tanah ini lebih dekat dengan pengertian membuka tanah atau membuka hutan. Artinya pemilikan tanah *yasas* lebih banyak diperoleh melalui pembukaan tanah baru dari pada pembelian atau warisan. Di atas tanah *yasas* ini pemiliknya mempunyai hak sepenuhnya untuk menguasai dan mengusahakan produksi tanaman untuk kepentingan keluarganya sendiri.

Tanah komunal atau tanah desa sendiri terdiri dari (1). Tanah garapan yang disediakan untuk penduduk desa baik itu berupa tanah persawahan maupun tegalan, tanah yang disediakan untuk penduduk miskin ini sering disebut sebagai tanah soksa, (2). Tanah jabatan atau lungguh atau bengkok, yaitu sebagai imbalan gaji untuk pamong desa, (3). Tanah pengareng-areng, yaitu tanah imbalan untuk pamong desa yang sudah pensiun, (4). Tanah untuk kepentingan umum yaitu dapat berupa makam, tanah pengembalaan, dan lain-lain dan (5). Tanah kas desa, yaitu tanah yang disediakan untuk pembiayaan desa.<sup>13</sup> Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah atau pelepasan hak atas tanah kepada orang lain secara tetap dapat diakibatkan karena warisan atau hibah dan jual beli. Sebagaimana tradisi pewarisan yang umum berlaku di Jawa. Proses ini dapat menimbulkan fragmentasi tanah kian lama kian mengecil. Begitu juga proses jual beli akan mengakibatkan munculnya akumulasi tanah dan mendesak pemilik tanah yang semakin mengecil menjadi barisan petani

---

<sup>11</sup> Biro Statistik DIY, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>12</sup> Gatut Murniatmo et.al. *Pola penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1989, hlm. 128.

<sup>13</sup> Machmoeh Effendhi, *Peluang Kerja dan keadaan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah kering: Kasus Gunungkidul (1969-1983)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1993, hlm. 24.

tidak bertanah. Selain pelepasan hak atas tanah secara tetap juga terdapat proses pelepasan hak penguasa atas tanah yang bersifat sementara, yakni melalui sistem sewa menyewa.

Penguasaan tanah dan kepemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul pada awal tahun 1970-an tidaklah jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa yakni sangat timpang. Kemungkinan besar keadaan lebih parah lagi karena tanah yang diusahakan petani sebagian besar merupakan tanah kering yang tandus dan tidak subur. Gambaran tersebut memang belumlah menjadi potret yang komprehensif mengenai struktur agraria di Gunungkidul karena itu tidak mencakup data mengenai tanah yang disewakan, dikontrakan dalam sistem penyangkap atau tanah yang dibagi hasil dan tidak menunjukkan bagian penduduk desa yang tidak memiliki tanah sama sekali. Di samping itu, daftar tanah di kantor-kantor pedesaan biasanya menunjukkan luas tanah milik rata-rata lebih tinggi dan jumlah pemilik lebih sedikit dari sesungguhnya. Hal itu disebabkan tidak semua pemilik tanah disebutkan dalam daftar pemilik tanah, meskipun mereka semua dikenal oleh para anggota masyarakat lainnya dan oleh pemerintah desanya.<sup>14</sup>

Kabupaten Gunungkidul pada masa itu masyarakat pedesaannya kebanyakan petani miskin. Daerah-daerah miskin disebabkan oleh faktor alam dan faktor pendidikan. Kondisi ini tidak dapat disangkal melihat jenis tanahnya yang kebanyakan berbukit-bukit karang atau batu kapur serta banyaknya telaga dan genangan air hujan, sedangkan pada musim kemarau penduduknya sangat kekurangan air. Penyebab kondisi kemiskinan salah satunya karena terbatasnya sumber daya air yang dibutuhkan penduduk untuk mandi, minum, dan pengairan sawah. Pada musim kemarau kebutuhan akan air penduduk tidak tercukupi. Sehingga, sebagian masyarakat membeli air atau kadang-kadang mendapatkan sumbangan air yang dialirkan melalui pompa. Pendidikan pada masyarakat Gunungkidul secara umum masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat rendahnya tingkat pendidikan orang-orang dewasa yang ada pada masa itu seperti umumnya masyarakat pedesaan di Indonesia. Di Kabupaten Gunungkidul belum banyak orang memperoleh pendidikan yang cukup atau pendidikan yang formal. Secara tradisional masyarakat Gunungkidul telah mengenal pendidikan yang mempunyai kaitan dengan pembentukan kepribadian dan tata susila untuk hidup berdampingan dengan orang lain sehingga tercipta suatu hubungan antawarga yang harmonis. Pendidikan tradisional ini dimulai sejak orang masih kecil di dalam lingkungan keluarga sebagai bentuk sosialisasi dari anak.

Akibat dari tekanan penduduk yang meningkat atas sumber daya tanah yang terbatas dalam keadaan teknologi yang konstan, batas-batas penguasaan tanah diperluas ke daerah yang lebih marginal dan tenaga kerja yang diperkerjakan pada setiap unit tanah yang ditanami jumlahnya lebih besar sehingga biaya produksi pangan pun mengalami kenaikan. Dalam keadaan semacam itu pendapatan petani atau buruh tani serta penyangkap mengalami penurunan sampai batas minimum untuk hidup. Tingkat pendapatan mereka nyaris tidak cukup untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang layak. Sementara itu surplus produksi lebih dinikmati oleh para petani kaya dan tuan tanah dalam bentuk kenaikan sewa tanah.<sup>15</sup>

Kecenderungan tersebut memang merupakan suatu fenomena yang sangat umum di daerah pedesaan Jawa. Petani gurem yang luas tanahnya dibawah 0,5 hektar merupakan lapisan petani marginal yang jauh tertinggal, antara lain karena kurangnya modal serta ketidakmampuannya melepaskan diri dari ikatan sebagian besar petani lapisan atas. Termasuk dalam golongan ini adalah lapisan buruh tani dan (setengah) *proletar* di pedesaan yang terutama bergantung pada kerja menjadi buruh upahan atau beragam usaha tani

---

<sup>14</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 184.

<sup>15</sup> Fadjar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 59.

lainnya yang bermodal kecil.<sup>16</sup> Golongan ini tidak pula dimasukkan kedalam golongan petani yang berdiri sendiri yang dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dalam program intensifikasi pemerintah.

Kondisi sosial ekonomi petani dengan demikian diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah Jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tani kaya atau tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.<sup>17</sup>

## V. KESIMPULAN

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul dapat dilihat dari tata guna tanah atau penggunaan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja apabila dilihat dari letak tanahnya. Terdapat tiga macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani yaitu tanah perkarangan, tanah tegalan dan tanah lereng bukit atau lereng gunung. Gelombang Revolusi Hijau yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an ternyata tidak pilih kasih. Artinya, ia tidak saja melanda daerah-daerah yang relatif subur seperti daerah persawahan tetapi juga melanda daerah-daerah lahan kering yang secara potensial miskin. Begitu juga di Daerah Gunungkidul yang sebagian besar tanahnya berupa lahan kering mendapat terpaan gelombang Revolusi Hijau melalui program-program pembangunan yang masuk ke daerah itu. Terdorong oleh masalah dilematis yakni apabila pembangunan pertanian dilaksanakan dengan titik penekanan pada peningkatan produksi pertanian, kerusakan tanah yang semakin parah akibat erosi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga, sebaliknya apabila pembangunan pertanian ditekankan pada penanggulangan erosi berarti akan mengundang kelaparan, maka pembangunan pedesaan di daerah ini dilakukan secara seimbang dan serasi. Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi di pihak lain telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak-dampak sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan yang timbulnya gejala stratifikasi sosial. Kesejahteraan petani miskin dan buruh tani tak bertanah tetap mandek atau bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Kondisi sosial ekonomi petani dengan demikian diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah Jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tani kaya atau tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

---

<sup>16</sup> Akira Nagazumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 23.

<sup>17</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 114.

## Daftar Pustaka

- [1] Akira Nagazumi. (1986). *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [2] Biro Statistis DIY.(1973). *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*. Yogyakarta.
- [3] Biro Statistik Kabupaten Gunung Kidul, *Kabupaten Gunung Kidul Tingkat II: Gunung Kidul Dalam Angka Tahun 1980*. Yogyakarta: Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik.
- [4] Fajar Pratikto. (2000). *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo.
- [5] Gatut Murniatmo et.at. (1989). *Pola penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.
- [6] Gottscalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*, ( penerjemah Nugroho Notosusanto), cet. IV, Jakarta: UI-Press.
- [7] Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006), *Pedoman Penelisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- [8] Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah, (cet. IV)*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- [9] Machmoed Effendhi. (1993). *Peluang Kerja dan Keadan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah Kering: Kasus Gunungkidul. Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- [10] Mubyarto. (1984), *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [11] Nur Aini Setiawati. (1996). *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*. Laporan Penelitian Fakultas Sastra UGM.
- [12] Sartono Kartodirdjo. (1984). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [13] Selo Soemardjan. (1986). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [14] Surat Kepala Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, *Prihal: Daerah-daerah Yang Secara Rutin setiap Tahun Kekurangan Bahan Makanan*. Yogyakarta, 10 Februari 1973.

Penguji Utama



Dr. Aman, M. Pd  
NIP. 19741015 200312 1 001

Yogyakarta, 5 Mei 2014  
Menyetujui,  
Pembimbing



Zulkarnain, M.Pd  
NIP. 19740809 200812 1 002